

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang dimaksud merupakan hal yang tidak diukur secara ekonomi maupun fisik saja, melainkan menata kehidupan sosial dan kebutuhan spiritual manusia. Kesejahteraan sosial merupakan sebuah kondisi dimana manusia, secara individu maupun masyarakat dalam konteks kesehatan, keadaan, ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup masyarakat.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis dan dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relatif baru berkembang. Adapun pengertian kesejahteraan sosial yakni :

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. (Fahrudin, 2014: 9)

Berdasarkan definisi kesejahteraan sosial di atas dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu individu mencapai kehidupan yang sejahtera dengan meningkatkan kemampuan individu atau kelompok secara penuh agar dapat memecahkan masalahnya sendiri maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memutuskan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya, adapun pandangan lain mengenai kesejahteraan sosial yaitu:

Suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. (Suharto, 2017: 1)

Definisi kesejahteraan sosial di atas dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta dan bertujuan untuk mencegah dan membantu mengatasi masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. (Fahrudin, 2014: 10)

Mengembangkan tiga tujuan utama dan sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu

pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem. Penjelasan mengenai pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem diantaranya sebagai berikut:

- a) **Pemeliharaan Sistem** Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan system kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan system rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.
- b) **Pengawasan Sistem** Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.
- c) **Perubahan Sistem** Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu system yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyingkahkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula. (Fahrudin, 2014)

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi – fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan–tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan–perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi–konsekuensi sosail yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*).
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*).
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini juga tercakup dengan fungsi pemulihan atau rehabilitasi.
- c. Fungsi Pengembangan (*Development*).
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- d. Fungsi Penunjang (*Supportive*).
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lain. (Fahrudin, 2014)

Berdasarkan kutipan di atas bahwa adanya fungsi dalam kesejahteraan sosial adalah untuk memberikan pertolongan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat agar keberfungsian sosialnya dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan dari sosio-ekonomi.

2.1.4 Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting bagi penunjang pekerja sosial dalam pelaksanaan aktivitas keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Pendekatan- pendekatan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Filantropi sosial
Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. pelaku dari filantropi ini disebut dengan filantropis
2. Pekerjaan sosial
Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya yaitu filantropi pekerjaan sosial disini merupakan pendekatan yang teroganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Perkembangan pekerjaan sosial sendiri juga tidak lepas dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan profesional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.
3. Administrasi sosial
Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah.
4. Pembangunan sosial
Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi. (Fahrudin, 2014)

Pendekatan kesejahteraan dalam implementasinya dapat ditempuh dengan melakukan peningkatan kesejahteraan. Paradigma intervensi dan praktik pekerjaan sosial harus lebih diarahkan kepada hal yang lebih komprehensif. Bukan hanya pendampingan sosial akan tetapi harus pendekatan sosial dan ekonomi, sehingga capaian ideal mengenai kesejahteraan sosial dapat terwujud. Pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi sosial dan pembangunan sosial. Filantropi yang sifatnya *charity* atau awal merupakan pendekatan yang pertama sebelum berkembang pada pendekatan yang lainnya. Setelah adanya filantropi sosial, muncul pendekatan kedua yaitu pekerjaan sosial yang lebih fokus pada penanganan masalah sosial. Administrasi sosial yang lebih

dikenal dengan pemberian program atau pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakat nya. Yang terakhir adalah pembangunan sosial yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial disini harus terencana karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2 Konsep Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang mempunyai berbagai dimensi. Karena, begitu banyaknya dimensi yang terkandung didalamnya, mengakibatkan hal ini menjadi objek kajian. Pada umumnya masalah sosial ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat.

2.2.1 Pengertian Masalah Sosial

Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial yakni karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik fisik maupun nonfisik. Fenomena ini disebabkan dengan adanya gejala atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma, dan standar sosial yang berlaku. Adapun definisi masalah sosial yakni:

Masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Dari definisi tersebut dapat diidentifikasi tiga unsur penting yaitu suatu situasi yang dinyatakan, warga masyarakat yang signifikan, dan kebutuhan akan tindakan pemecahan masalah Weinberg dalam (Soetomo, 2015: 7)

Berdasarkan definisi masalah sosial di atas dapat dipahami bahwa suatu situasi dapat dikatakan sebagai masalah sosial ketika ketiga unsur penting tersebut tercapai yakni suatu gejala harus didefinisikan dan diidentifikasi sebagai masalah

oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat membutuhkan suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut agar masyarakat dapat menjalankan keberfugian dan nilai-nilai di masyarakat. Adapun pandangan lain mengenai definisi masalah sosial yaitu:

- a. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memerkosa adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
- b. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai gangguan, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak (Huraerah, 2008)

Definisi masalah sosial di atas menjelaskan bahwa suatu masalah sosial di anggap masalah apabila hal tersebut dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat melanggar adat istiasat dalam warga masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Denan demikian bahwa adat-istiadat dan kebudayaan tersebut memiliki nilai pengontrol terhadap tingkah laku dalam anggota masyarakat.

2.2.2 Karakteristik Masalah Sosial

Masalah sosial muncul karena adanya kekurangan dalam diri manusia yang bersumber dari faktor ekonomi, biologis, biopsikologis serta kebudayaan. Faktor ekonomi yang salah satunya adalah kemiskinan. Adapun karakteristik masalah sosial yakni:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial.
2. Kondisi dinilai tidak menyenangkan. Menurut faham hedonisme, orang yang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan

menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya.

3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar akan segera dicarinya rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli obat. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai dibicarakan dan diseminarkan, karena dianggap sebagai masalah sosial.
4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif, masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang (Huraerah, 2008)

Berdasarkan karakteristik masalah sosial di atas dapat dipahami bahwa suatu kondisi dalam masyarakat dapat dikatakan masalah sosial ketika kondisi tersebut dirasakan oleh sebagian orang atau banyak orang kemudian kondisi tersebut merupakan kondisi yang tidak menyenangkan sehingga menuntut untuk adanya suatu pemecahan, pemecahan masalah sosial ini dilakukan melalui aksi-aksi sosial.

2.2.3 Komponen Masalah Sosial

Banyak komponen agar dapat memahami arti dari masalah sosial yang sesungguhnya. Seperti yang dikemukakan oleh Parillo yang dikutip dari Soetomo (1995:4) dalam (Huraerah, 2008) menyatakan, ada empat komponen, yaitu:

- a. Masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu.
- b. Dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau mental, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Dari komponen di atas jelas bahwa suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila masyarakat dirasa masalah tersebut dapat menimbulkan kerugian secara luas, melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat, dan masalah tersebut membutuhkan pemecahan sebagai solusinya agar terciptanya suatu kondisi yang lebih dari harapan dan kondisi yang sejahtera.

2.2.4 Upaya Pemecahan Masalah Sosial

Tindakan *treatment* atau upaya pemecahan masalah yang ideal adalah apabila dapat menghapus atau menghilangkan masalahnya dari realitas kehidupan sosial. *Treatment* tidak harus diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan masalah sosial, akan tetapi dalam banyak hal juga dapat berupa usaha untuk mengurangi atau membatasi berkembangnya masalah. Penanganan masalah sosial juga bukan hanya bersifat rehabilitatif tetapi ada usaha-uaha lainnya sebagai berikut:

1. Usaha Rehabilitatif

Fokus utama usaha ini terletak pada kondisi penyandang masalah sosial, terutama upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap kondisi yang tidak diharapkan atau yang dianggap bermasalah, menjadi kondisi yang sesuai harapan atau standar sosial yang berlaku.

2. Usaha Preventif

Usaha rehabilitatif merupakan usaha penanganan masalah sosial dengan fokus perhatian pada kondisi masalah sosial yang sudah terjadi, dengan demikian

merupakan usaha perubahan, perbaikan agar masalah sosial terpecahkan atau terselesaikan. Sementara usaha preventif mempunyai fokus perhatian pada kondisi masalah sosial yang belum terjadi, walaupun mungkin saja di dalamnya terkandung potensi muncul masalah sosial. Dengan kata lain usaha ini merupakan usaha pencegahan dan usaha antisipatif agar masalah sosial tidak terjadi.

3. Usaha *Developmental*

Usaha *developmental* dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas seseorang atau sekelompok orang dapat memenuhi kehidupan yang lebih baik.

2.3 Konsep Usaha Kesejahteraan Sosial

2.3.1 Definisi Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha Kesejahteraan sosial pada umumnya hanya disebut pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah, instansi, atau lembaga. Hal tersebut sebenarnya bertujuan untuk memberikan solusi dalam pelayanan masalah-masalah sosial, akan tetapi usaha yang diberikan harus berjalan sesuai sistem dalam hal mewujudkan pengembangan kesejahteraan sosial hingga mampu memelihara dalam proses dan pengakhirannya. Definisi dari usaha kesejahteraan sosial yaitu:

Kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan. (Fahrudin, 2014:15)

Usaha kesejahteraan sosial ini ditunjukkan pada individu, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah dan menangani masalah sosial yang

ada dengan cara adanya pelayanan-pelayanan yang diberikan baik oleh komunitas, lembaga, instansi ataupun pemerintah dalam hal memberikan perlindungan dan pemeliharaan sumberdaya manusia sehingga terjadinya kesinambungan dalam menjalankan hidup sesuai fungsi dan perannya. Dalam UU No.6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 bahwa “usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial”. Sementara dalam UU No.11 Tahun 2009 dinyatakan usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

2.3.2 Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial pada suatu organisasi / lembaga yang menyediakan layanan sosial dalam pandangan yang lebih luas seringkali disebut dengan nama organisasi pelayanan masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat dalam mengadakan usaha kesejahteraan sosial. Tiga tujuan dari suatu organisasi pelayanan masyarakat menyediakan Usaha Kesejahteraan Sosial yaitu:

1. Tujuan Kemanusiaan dan keadilan Tujuan ini bersumber dari gagasan ideal demokratis tentang keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri mereka yang dimiliki, meskipun terkadang potensi tersebut adanya hambatan fisik, sosial, ekonomi, kejiwaan maupun faktor lainnya. Usaha kesejahteraan sosial menjadikan mereka sebagai

kelompok sasaran dalam upaya menjembatani kelangkaan sumber daya yang mereka miliki.

2. Tujuan yang terkait dengan pengendalian sosial Tujuan ini berkembang berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan, kekurangan, ataupun tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya akan dapat melakukan serangan atau menjadikan ancaman bagi kelompok masyarakat yang sudah mapan, oleh karena itu kelompok masyarakat yang sudah mapan berupaya mengamankan diri mereka dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan, pemilikan maupun stabilisasi yang sudah ada
3. Tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang direncanakan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi. Dalam hal ini maka disebutkan bahwa pembangunan ekonomi ini harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat dengan itu maka akan berdampak baik pada kelangsungan kehidupan sesama. (Adi, 2012: 87)

Dari pertanyaan di atas dijelaskan bahwa tujuan usaha kesejahteraan sosial dalam pelayanan dimasyarakat adalah suatu tindakan dalam membangun usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak terkait bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata sehingga masyarakat mampu dalam menjalankan fungsi sosialnya.

2.3.3 Fokus Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial pada umumnya berbentuk dari pelayanan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir terutama dalam secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, pendampingan, dan perlindungan terhadap individu yang mengalami masalah sosial. Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial yang utama dan pertama adalah penanggulangan kemiskinan dan manifestasinya Seperti rendahnya pendapatan atau rumah tidak layak huni. Usaha Kesejahteraan Sosial memfokuskan pada 3 bidang, yaitu pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2017)

2.4 Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan salah satu upaya penting dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang termasuk kedalam kelompok lemah dan kurang. Hal ini dapat berarti pemberian kesempatan bagi masyarakat tersebut untuk mampu memperbaiki kehidupan khususnya bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.

2.4.1 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau pemberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; menjangkau sumber-sumber produksi yang memungkinkan mereka dalam meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pelaksanaan pemberdayaan melibatkan berbagai dimensi yang ada dari setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun pengertian pemberdayaan masyarakat yang lain sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup adil untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Suharto, 2017: 58)

Pemberdayaan masyarakat dikatakan sebagai serangkaian proses yang menghasilkan masyarakat yang mampu ikut melibatkan diri, dapat mengawasi, berpengaruh bagi apapun yang ada di sekitarnya yang membutuhkan peranannya. Semua itu didapatkan apabila masyarakat telah mendapat aktualisasi diri berupa keterampilan, pengetahuan, dan kuasa yang akan memiliki pengaruh bagi diri dan sekitarnya. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat sebagai proses adalah sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki. (Huraerah, 2008: 87)

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan terhadap kemandirian dari masyarakat itu. Maka dengan berbagai proses yang terdiri dari berbagai tahap seperti analisis terhadap masalah yang dihadapi, membantu menemukan solusi, penyelesaian terhadap masalah bahkan diberi pemahaman mengenai pemanfaatan kemampuan yang dimiliki yang sebenarnya dapat menjadi kekuatan besar bagi masyarakat sehingga dapat membantu dalam peningkatan kualitas kehidupannya sendiri.

2.4.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan, potensi, harapan, masalah yang ada didalam masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada kerjasama sebagai partner.

2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, evolutif, dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui pembangunan ekonomi secara paralel. (Suharto, 2017: 68)

Berbagai konsep pemberdayaan masyarakat yang berlaku dan darinya dijadikan acuan, maka secara umum kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang banyak dilakukan dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Bantuan Modal

Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan. Tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi menjadi faktor penting yang harus dilakukan. Dalam konteks ini, ada dua hal penting yang perlu dicermati, yaitu Pertama, lemahnya ekonomi masyarakat ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha, tetapi juga masyarakat yang tidak mempunyai faktor produksi atau masyarakat yang pendapatannya bergantung pada gaji. Dalam pemberdayaan aspek ini, nampaknya pemberdayaan masyarakat perlu dipikirkan bersama. Kedua, perlunya mencermati usaha pemberdayaan masyarakat melalui aspek

permodalan ini adalah, 1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; 2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru melalui usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses dilembaga keuangan; 3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem.

b. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah mereka melakukan aktifitasnya.

c. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat.

d. Kelembagaan

Keberadaan sebuah lembaga atau organisasi di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan. Adanya Lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi, selain mereka dilatih untuk hidup tertib. Fungsi lembaga tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan seperti, permodalan, media musyawarah, dan lain sebagainya. (Suharto, 2017)

Keempat kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi penting untuk dilakukan dan diterapkan dalam menunjang dan mempercepat akselerasi kualitas hidup masyarakat yang pada awalnya belum berdaya menjadi berdaya, dan mandiri.

2.4.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses merupakan serangkaian tahap tahap atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, pemangku kepentingan, elemen-elemen kemasyarakatan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan sebagai berikut:

Pertama, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. Kedua, melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (partisipatif). Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat,

membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus menerus). Ketiga, menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. Keempat, mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat. Kelima, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Keenam, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya. (Huraerah, 2008)

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap tertentu yang dimulai dengan tahap yang membantu masyarakat untuk menemukan masalah, di dalamnya diberikan perubahan kepada pemikiran masyarakat sasaran agar mereka menyadari adanya masalah. Kemudian tahap masyarakat melakukan kajian terhadap masalah yang ditemukan. Selanjutnya tahap di mana dilakukan pemilihan agar dapat terlihat mana masalah yang paling cocok untuk diselesaikan mengingat situasi yang mendesak.

Tahap lain yaitu tahap untuk melakukan perencanaan atas masalah yang akan diselesaikan, termasuk di dalamnya perencanaan program, perencanaan anggaran. Tahap selanjutnya merupakan tahap di mana masyarakat diberi aksi-aksi yang melibatkan tenaga dan pikirannya seperti pelatihan-pelatihan, pembinaan, dan bantuan. Tahap terakhir yaitu tahap lanjutan di mana masyarakat yang telah mengikuti proses sebelumnya diberi kesempatan untuk berkembang sendiri sesuai kemampuannya, mengevaluasi apapun yang telah dilakukan demi perbaikan kualitas kehidupannya.

2.4.5 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan atau pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh pendekatan pemberdayaan yang digunakan. Proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat

dicapai dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P sebagai berikut :

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. (Suharto, 2017: 67)

Terkait dengan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan pemberdayaan terdiri dari 5 bagian di antaranya pembebasan masyarakat dari sekat-sekat menonjol yang selama ini menimbulkan keseganan untuk bergerak dan berubah. Kemudian dilakukan penguatan terhadap masyarakat agar mampu percaya diri atas hal-hal baik yang bisa dan dibantu dimaksimalkan. Lalu melindungi masyarakat dari ketertindasan atas persaingan yang tidak sehat, ketimpangan kubu kuat dan lemah serta kecil. Disokong oleh bimbingan dan dukungan lanjut agar peranan dan tugas kehidupannya dapat berjalan dengan seharusnya. Pemeliharaan

merupakan pendekatan yang terakhir agar terjadi situasi yang stabil di antara kelompok-kelompok masyarakat yang telah diberdayakan sehingga terjadi keselarasan dan keseimbangan yang membuat masyarakat berusaha menjadikan kehidupannya berkualitas.

2.4.6 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pekerja sosial dalam melakukan pemberdayaan masyarakat harus ada strategi yang digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan serta agar pemberdayaan yang dilakukan dapat tertuju dan terlaksana dengan baik pada masyarakat. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individu; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam artian mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerja sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga azas atau matra pemberdayaan: mikro, mezzo, dan makro. Azas pemberdayaan pekerja sosial yaitu:

- a. Azas mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress mangement, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tuga-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.
- b. Azas mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Azas makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, perorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk

memahami situasisituasi mereka sendiri, dan untuk memiliki serta menentukan strategis yang tepat untuk bertindak. (Suharto, 2017: 66)

Pekerja sosial dalam melakukan strategi pemberdayaan masyarakat khususnya pada program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga dapat menggunakan azas mezzo karena dalam proses intervensinya dalam program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga ini dilakukan terhadap kelompok, sehingga kelompok tersebut memiliki kemampuan untuk memecahkan satu permasalahan.

2.5 Tinjauan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga

2.5.1 Pengertian Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga

Program UP2K adalah salah satu bentuk program pemerintah yang ditujukan kepada kaum perempuan dan hanya diprioritaskan kepada mereka yang kurang mampu atau minim modal untuk membuka atau mengembangkan usahanya, tetapi program ini cukup berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Atau lebih jelasnya pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya tambahan modal dari pendapatan mereka, hal tersebut dilakukan pemerintah bertujuan sebagai berikut:

Pemerintah mengingat kondisi kaum perempuan saat ini, dimana tingkat Pendidikan dan tingkat keterampilan yang rendah, serta tingkat produktivitas yang rendah pula sehingga mengakibatkan tidak mampu mendukung perekonomian rumah tangga (Pedoman Pelaksanaan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga 2010)

Adapun dasar hukum pelaksanaan UP2K yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53B Tahun 1993 tentang Pedoman Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga.

2.5.2 Tujuan program UP2K

Program UP2K memiliki tujuan tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok atau perorangan agar dapat meningkatkan pendapatan sehingga tercapainya kondisi sejahtera. Adapun tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

Tujuan umum dari UP2K ini adalah membina dan mengembangkan kegiatan usaha keluarga yang tergabung dalam kelompok atau perorangan sehingga secara bertahap mampu menjadi wiraswasta serta memungkinkan timbulnya kegiatan yang bersifat koperatif. Sementara tujuan khusus UP2K adalah untuk membantu modal usaha bagi usaha ekonomi lemah untuk menumbuhkan kewiraswastaan, membantu pengembangan usaha bagi usaha yang membutuhkan penambahan modal, membantu modal usaha untuk usaha perkreditan guna memenuhi kebutuhan modal dan mengurangi ketergantungan dari para pelepas uang, dan menumbuh kembangkan kegiatan usaha yang bersifat koperatif untuk memperkokoh perkembangan KUD (Pedoman Pelaksanaan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga 2010).

Berdasarkan tujuan khusus dan tujuan umum dari Program UP2K dapat dipahami bahwa program tersebut dapat sangat berdampak bagi masyarakat khususnya keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah, dengan adanya program ini masyarakat dapat memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan yang dapat memperbaiki kualitas diri dan kelompoknya.

2.5.3 Sasaran Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sasaran merupakan target spesifik dan dapat ditindaklanjuti untuk mencapai objektivitas tertentu, sasaran juga dapat menggambarkan tindakan atau kegiatan yang terlibat dalam mencapai tujuan, adapun sasaran program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga yakni:

Keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah dan telah memiliki kegiatan usaha yang tergabung dalam kelompok dan benar-benar membutuhkan penambahan dana usaha. Melihat kepada ruang lingkupnya yaitu untuk

pemenuhan kebutuhan mayoritas warga masyarakat, sudah barang tentu program ini mempunyai nilai positif untuk dikembangkan. UP2K-PKK tergolong pada jenis usaha kecil atau ekonomi kerakyatan yang memiliki ciri-ciri pokok bersifat tradisional, skala usaha kecil, dan pemenuhan kebutuhan pokok/necessities (Pedoman Pelaksanaan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga 2010).

Berdasarkan sasaran program UP2K tersebut, maka dapat dipahami bahwa program UP2K ini sangat bermanfaat bagi penerima manfaat program yakni masyarakat atau kelompok yang memiliki usaha namun membutuhkan modal sehingga usaha yang dijalankannya dapat berkembang dan bersaing kemudian dapat memperoleh keuntungan yang mencukupi kehidupannya.

2.6 Implikasi Teori Pekerjaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Jayagiri

Pekerjaan sosial merupakan aktifitas profesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kemampuannya berfungsi sosial serta menciptakan kondisi-kondisi yang menunjang tujuan tersebut. Pekerjaan sosial merupakan profesi yang profesional melakukan pertolongan yang memperhatikan relasi antara manusia dengan lingkungan inter pribadi maupun organisasional dengan memberikan pertolongan untuk mengubah atau meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dengan lingkungannya serta mengembangkan lingkungan sosial agar dapat mendukung kesejahteraan manusia. Menurut Asosiasi nasional pekerjaan sosial amerika serikat (NASW) adalah sebagai berikut:

Social work is the professional activity of helping individuals, groups or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and

to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counselling and psychoteraphy for individuals, families, and groups; helping communities or groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural intitutions; and of the interaction of all these factors. (Fahrudin, 2014: 60)

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan bagi tujuan mereka. Praktik pekerjaan sosial terdiri dari penerapan nilai-nilai, prinsip, dan teknik pekerja sosial secara profesional pada atau lebih dari. Pekerjaan sosial juga memiliki tujuan sebagai berikut: membantu orang mendapatkan layanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok; membantu masyarakat atau kelompok memberikan atau meningkatkan layanan sosial dan kesehatan; dan berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan. Praktek pekerjaan sosial membutuhkan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; dari intitusi sosial, ekonomi, dan budaya; dan interaksi semua faktor ini.

Berdasarkan kutipan di atas, pekrja sosial menerapkan nilai dan prinsip pekerja sosial dalam membantu individu, keluarga, atau kelompok dan masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhannya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan keberfungsian sosial tersebut dapat dicapai apabila dapat memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial.

Keberfungsian sosial adalah suatu konsep untuk memenuhi kesejahteraan sosial, dan merupakan konsep penting bagi pekerja sosial. Keberfungsian sosial juga merupakan konsep pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan keberfungsian sosial manusia, supaya dapat memenuhi kebutuhan dan tercapainya relasi serta adaptasi dengan lingkungan secara baik di masyarakat. Kesejahteraan

sosial bertujuan untuk dapat mengurangi tekanan-tekanan yang mengakibatkan konsekuensi sosial yang negative akibat pembangunan serta dapat menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi kesejahteraan diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (Preventive)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (Curative)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (Development)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (Supportive)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. (Fahrudin, 2014: 12)

Fungsi-fungsi tersebut berusaha dicapai untuk mengurangi tekanan dan mencegah masalah sosial baru. Secara kompleks fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masing-masing fungsinya memiliki fokus tersendiri. Diantaranya fungsi pencegahan ditujukan untuk memperkuat setiap orang untuk terhindar dari masalah, lalu fungsi pengembangan bertujuan untuk dapat memberi pembangunan melalui proses pengembangan di tatanan dan sumber daya sosial dalam masyarakat. Secara tradisional pekerjaan sosial dikatakan mempunyai tiga metode pembantu, diantaranya sebagai berikut:

metode pokok tersebut yaitu: “(1) Metode Pokok : *social case work*, *social group work* dan *community organization/community development*.(2)

Metode Pembantu : *social work administration, social action, dan social work research*". (Fahrudin, 2014: 71)

Metode tersebut sama-sama penting dalam menjalankan peranannya. Penggunaan metode tersebut tergantung pada kasus atau permasalahan klien yang bersangkutan, kemampuan dari pekerja sosialpun menentukan apakah penggunaan metode tersebut dapat berhasil atau tidak dalam memecahkan permasalahan klien.

2.6.1 Fokus Pekerjaan Sosial

Fokus pekerjaan sosial adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial, maka merujuk pada praktik pekerjaan sosial memiliki tujuan praktik pekerjaan sosial. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial. (Fahrudin, 2014a)

Bahwasannya profesi pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial untuk meningkatkan kemampuan dan mengatasi masalah hingga menghubungkan kepada sistem sumber dan pelayanan-pelayanan sosial untuk memperbaiki kebijakan sosial yang ada.

2.6.2 Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dalam penyelenggaraanya meliputi fungsi-fungsinya tersendiri. Penunjang terhadap tujuannya juga yaitu membagi fungsi dasar pekerjaan sosial menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Mengembangkan memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin memadainya standar-standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang.
3. Meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam institusi-institusi sosial.
4. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial (*social order*) serta struktur institusional masyarakat. (Sukoco, 1992, pp. 52–54)

Berdasarkan kutipan diatas, dapat diketahui bahwa fungsi-fungsi pekerjaan sosial itu berfokus pada kebutuhan-kebutuhan dasar, standar-standar, kesehatan, kesejahteraan. Status dan peranan dalam institusi sosial, ketertiban sosial, serta institusional yang ada pada masyarakat untuk tercapainya keberfungsian sosial.

2.6.3 Prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai proses yang tentunya profesional, dalam ketentuannya memiliki prinsip-prinsip yang menaungi dan mengiringi dalam kelangsungannya. Enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. **Penerimaan**
Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa “menghakimi” klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap menerima (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian ia (klien) dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan dan kesulitan yang mengganjal di dalam pembicaraan.
2. **Komunikasi**
Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem klien maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain.
3. **Individualisasi**
Prinsip individualisasi pada intinya mempertimbangkan setiap individu yang berbeda satu sama lain sehingga seorang pekerja sosial haruslah

mengatur cara memberi kliennya guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

4. Partisipasi

Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus meminta kliennya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.

5. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).

6. Kesadaran diri pekerja sosial

Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak “kaku” dalam percakapan dengan pekerja sosial, yang pesan informasi atau cara bicara, cara berbicara, dan lain-lain, bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses. (Fahrudin, 2014)

Berdasarkan kutipan diatas, dapat dipahami bahwasannya pekerja sosial harus menerima klien tanpa memandang seseorang berasal dari keluarga mampu atau tidak menerima siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat ras,suka,dan agama. Pekerja sosial menawarkan beberapa alternatif dalam penyelesaian masalah dan klien mempunyai hak untuk memilih jalannya dalam menyelesaikan masalahnya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut pekerja sosial diharapkan untuk berperilaku etis, namun tanggungjawab utama untuk tingkah laku etik, setidak-tidaknya ditentukan ditentukan/diperintah oleh kode etik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk oleh pekerja sosial.

2.6.4 Tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial akan melalui beberapa tahapan, dalam pelaksanaannya. Tahapan-tahapan ini disebut dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial, terdapat enam intervensi pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap *engagement, intake* dan *contract*
Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang akan diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu klien memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Kontrak diartikan sebagai suatu kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dengan klien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan lainnya.
- b. Tahap *Assessment*
Assessment merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapat ditentukan fokus atau akar masalah klien.
- c. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi
Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut.
- d. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan Rencana Intervensi
Pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.
- e. Tahap Evaluasi
Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh pekerja sosial yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.
- f. Tahap Terminasi
Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena

adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten. Pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan. (Fahrudin, 2014a)

Penjelasan dari enam tahapan intervensi pekerjaan sosial diatas merupakan suatu tahapan-tahapan yang harus dipahami oleh seluruh pekerja sosial. Tahapan-tahapan ini bisa diterapkan pada individu, kelompok, dan masyarakat.

2.6.5 Peran-peran Pekerjaan Sosial

Peran pekerja sosial dalam menangani permasalahan mencakup tiga level, yakni level mikro (individu), mezzo (keluarga dan kelompok kecil) dan makro (organisasi atau masyarakat). Pada masing-masing level peran pekerja sosial memiliki metode-metode yang berbeda-beda dalam penanganannya. Di level mikro dikenal sebagai *casework* (terapi perseorangan atau terapi klinis), di level mezzo ada beberapa metode *groupwork* (terapi kelompok) dan *family therapy* (terapi keluarga) dan pada level makro menggunakan metode *community development* (pengembangan masyarakat) atau *policy analysis* (analisis kebijakan). Peran yang dilakukan pekerja sosial dalam suatu masyarakat atau badan atau lembaga atau panti sosial akan beragam tergantung pada permasalahan yang dihadapinya.

Peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial antara lain:

1. Peranan sebagai Perantara (*Broker Roles*).
Pekerja sosial menghubungkan antara anak asuh dengan sistem sumber baik batuan berupa materi ataupun non materi yang ada di suatu badan atau lembaga atau panti sosial baik panti asuhan, panti rehabilitasi dan lain-lainnya. Sebagai perantara pekerja sosial juga harus berupaya untuk mencari suatu jaringan kerja dengan suatu organisasi atau perusahaan yang dapat membantu pelayanan yang dibutuhkan.
2. Peranan sebagai Pemungkin (*Enabler Roles*).
Peranan ini merupakan peran pekerja sosial yang sering digunakan dalam profesinya karena peran ini menggunakan konsep pemberdayaan dan

difokuskan pada kemampuan, keahlian, kapasitas, dan kompetensi anak asuh untuk menolong dirinya sendiri. Pada peranan ini pekerja sosial berperan sebagai konselor berusaha untuk memberikan peluang agar kebutuhan dan kepentingan anak asuh dapat terpenuhi dan terjamin, mengidentifikasi tujuan memfasilitasi untuk berkomunikasi, serta memberikan peluang untuk pemecahan masalah yang dihadapi anak asuh. Anak asuh melakukan semaksimal mungkin kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat dan dapat mengatasi permasalahannya.

3. Peranan sebagai Penghubung (*Mediator Role*).
Peran pekerja sosial sebagai penghubung (*mediator role*) adalah bertindak untuk mencari kesepakatan, sebagai penengah dalam perbedaan, konflik antar anak asuh dengan keluarga, konflik antar anak asuh yang satu dengan yang lain, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan memperoleh hak-hak yang semestinya.
4. Peranan sebagai Advokasi (*Advocator Role*).
Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial disini berbeda dengan advokat hukum. Advokat hukum dituntun melalui keinginan hukum sesuai dengan hukum pada suatu negara, sedangkan untuk advokat pekerja sosial dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari anak asuh atau penerima pelayanan.
5. Peranan sebagai Perunding (*Conferee Role*).
Peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan anak asuh atau penerima layanan mulai bekerja sama. Peran pekerja sosial ini dilakukan ketika pencarian data, pemberian gambaran pada korban.
6. Peranan Pelindung (*Guardian Role*).
Peran pekerja sosial sebagai pelindung (*Guardian Role*) seringkali dilakukan oleh bidang aparat, akan tetapi pekerja sosial dapat berperan melindungi anak asuh atau penerima pelayanan, juga orang-orang yang beresiko tinggi terhadap kehidupan sosialnya.
7. Peranan sebagai Fasilitasi (*Fasilitator Role*).
Seorang fasilitator pekerja sosial harus memberikan pelayanan yang bervariasi dalam memberikan pelayanannya tergantung pada kebutuhan serta masalah yang dihadapi anak asuh hal ini bertujuan agar anak asuh tidak merasa tertekan dan jenuh dengan pelayanan yang diberikan apabila pelayanan tersebut bervariasi dan menarik bagi anak asuh. Di samping itu, peran ini sangat penting untuk membantu meningkatkan keberfungsian anak asuh khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam pemecahan masalah yang dihadapi anak asuh.
8. Peranan sebagai Inisiator (*Inisiator Role*).
Peranan yang memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk menjadi masalah.
9. Peranan sebagai Negosiator (*Negotiator Role*).
Peran ini dilakukan terhadap anak asuh yang mengalami konflik atau permasalahan dan mencari penyelesaiannya dengan kompromi dengan

persetujuan dan kesepakatan bersama anatar kedua belah pihak. Posisi seorang negosiator berbeda dengan mediator yang posisinya netral. Seorang negosiator berada pada salah satu posisi yang sedang memiliki konflik. (Suharto, 2017)